

KORUPSI DAN ELIT POLITIK

(Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Korupsi Anas Urbaningrum di Harian *Seputar Indonesia* (SINDO))

Nostal Nuans Saputri

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya
amiranimas@gmail.com

Catur Suratnoaji

Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Surabaya
catur_sa@yahoo.com

ABSTRACT

Corruption scandal that involves a high rank political figure is one issue which has a high news value in media. Therefore, it is not surprising if the media reported it very often especially when it coincided with the moment before the general election. By using the Critical Discourse Analysis (CDA) framework, this study specifically intends to construe the discursive strategies and to probe for ideological goals behind the media text construction about the former Democrat Party leader, Anas Urbaningrum, corruption case. It focuses on news reporting related to Anas corruption case in Seputar Indonesia (SINDO) daily during February 2014, at the moment when the Corruption Eradication Commission (KPK) declared him a suspect of Hambalang athlete homestead corruption case. The analysis of this study adopts the Teun Van Dijk's sociocognitive approach that divided the texts into three level of analysis, e.g. text, social cognition, and social context. The data obtained by documenting texts about Anas corruption case in February 2013, in-depth interviews, and literature analysis. The linguistic analysis in the text level concludes that SINDO daily consistently and sistematically presents data showing that Anas' case is more political than criminal. The authors find that SINDO provides considerable political and law analysts' comments supporting its claim that Anas has become a victim of a high political scenario who wants him retreat from his leadership in the beginning of their news texts body. In addition, in the title of the news text, they also put Anas in object position that represent his powerless position. Related to this, SINDO provides less space for counter statement from powerful side in Democrat Party who were allegedly attacking Anas political position. Further, analysis in the level of socio-cognitive and social context show that SINDO defends Anas because they believe that Anas has been judged by the majority press even before the trial court actually implemented.

Keywords: Corruption Discourse, Political Elite, Critical Discourse Analysis, Media

PENDAHULUAN

Menjelang Pemilu tahun 2014, selain berita tentang situasi politik tanah air, media massa juga kerap mengangkat isu mengenai

korupsi elit partai politik. Salah satu yang penulis temukan adalah berita tentang korupsi yang diduga dilakukan oleh oleh mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dari sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga Indonesia Indicator pada tahun 2013, pada rentang 1 Januari-Desember 2013, nama Anas Urbaningrum dikutip dalam 10.656 berita tentang korupsi elit parpol (Auliani, 2013). Masih menurut survei yang sama, jumlah tersebut jauh melampaui jumlah pemberitaan mengenai politisi korup lainnya, misalnya Muhammad Nazaruddin dan Luthfi Hasan Ishaq (Auliani, 2013). Terlebih lagi, isu mengenai keterlibatan Anas telah diungkapkan oleh mantan bendahara umum PD sejak tahun 2012.

Dari studi pendahuluan di beberapa harian nasional, penulis menemukan bahwa ada dua wacana yang dikembangkan oleh media-media tersebut mengenai isu korupsi Anas. Sebagian besar media yang peneliti amati, menonjolkan tema tentang penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Anas. Namun ada satu media yang penulis temukan justru secara konsisten mengusung topik tentang adanya skenario politik untuk mendesak Anas mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PD dibalik publikasi yang intens mengenai keterlibatan Anas pada korupsi pembangunan wisma atlet di Hambalang Bogor. Media itu adalah harian *Seputar Indonesia* (SINDO) milik grup MNC.

Peneliti menemukan bahwa konsistensi *SINDO* dalam mengambil posisi membela Anas berbeda dengan posisi pemberitaan mengenai korupsi elit Parpol lainnya, semisal mengenai kasus korupsi impor sapi yang dilakukan oleh mantan Presiden PKS Lutfie Hassan Ishaq (Laluhulu, 2013) atau pemberitaan korupsi Hambalang yang melibatkan mantan menteri olahraga yang juga menjabat sebagai sekretaris dan Anggota Dewan Pembina serta Sekretaris dan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng (Riadi, 2013). Pada dua kasus korupsi tersebut, *SINDO* terlihat lebih menonjolkan aspek hukum daripada aspek politik yang sama-sama diisukan ketika itu pada pemberitaannya.

Dari rangkaian kajian empiris di atas, penulis tertarik untuk menguraikan strategi diskursus harian *SINDO* dalam mengkonstruksi teks berita tentang kasus Anas serta menguak kekuatan apa berpengaruh dibalik teks berita Anas sehingga media tersebut secara konsisten menonjolkan *frame* yang berbeda dari media lain. Padahal, apabila mengutip pendapat Dharmasaputra (2009) bahwa di negara-negara demokratis, media bersama kelompok masyarakat madani memiliki peranan penting untuk memfasilitasi diskusi publik mengenai apa yang patut dan

tidak patut dilakukan. Hal ini termasuk ‘menggiring’ opini publik agar mengawasi serta, apabila perlu, melancarkan kritik terhadap pemerintah dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Untuk mengkaji makna tersembunyi dalam sebuah teks media, tidak cukup hanya dengan menggunakan metode analisis isi maupun analisis aspek bahasa saja karena teks media lahir dalam konteks sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode Studi Wacana Kritis/Critical Discourse Study untuk mengkaji teks berita mengenai korupsi Anas. Menurut Machin dan Mayr (2012: 25) tujuan dari *Critical Discourse Analysis* (CDA) adalah “*to draw out ideologies, showing where they might be buried*” (menarik kesimpulan mengenai muatan ideologi serta kemungkinan letaknya disembunyikan di dalam sebuah teks (wacana).

Dalam konteks penelitian ini, studi wacana kritis berupaya untuk membongkar bagaimana media menanamkan dan melegitimasi terminologi korupsi menurut versi mereka kepada khalayak melalui klaim-klaim kebenaran yang natural pada wacana korupsi Anas Urbaningrum. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menetralsir efek wacana *SINDO* dengan memberikan informasi seluas-luasnya mengenai faktor-faktor dibalik

pemberitaan kedua media tersebut tentang korupsi Anas Urbaningrum.

TINJAUAN PUSTAKA

Bila dipelajari dengan pendekatan kritis, realitas yang dibentuk oleh teks media hanyalah realitas yang ada di permukaan (di kulit) dan hanya bersifat semu (Kriyantono, 2012). Realitas tersebut dibentuk oleh kelompok-kelompok tertentu didalam masyarakat dalam kurun waktu yang panjang untuk mempromosikan nilai-nilai tertentu. Untuk memperoleh gambaran hubungan antara kekuatan (*power*) dengan ideologi yang menjadi karakteristik utama dalam kajian CDA, maka peneliti menggunakan model kognisi sosial Van Dijk. Lebih detil, model Van Dijk tersebut dipilih untuk mengetahui bagaimana media menggunakan akses istimewanya (*priviledge*) melalui pemberitaan (*knowledge*) yang dapat memberikan kewenangan, status, dan pengaruh untuk mendominasi, memaksa, serta mengontrol pikiran maupun perilaku kelompok subordinat (publik).

Menurut Van Dijk (2013), kognisi sosial yang merupakan representasi dari kepercayaan, persepsi, pengetahuan, ideologi wartawan adalah penjembaran antara analisis struktur teks, dan konteks sosial. Dengan

menggunakan model analisis tersebut, penelitian ini mampu menggambarkan tujuan ideologis produsen teks berita dalam wacana mengenai korupsi Anas di Harian *SINDO*. Van Dijk (dikutip oleh Eriyanto, 2001: 266) menyatakan bahwa di dalam keseluruhan proses produksi berita pada akhirnya mental dan proses kognisi memiliki pengaruh lebih besar. Namun demikian, hal itu bukan berarti faktor kepemilikan modal, kontrol institusi, profesi tidak berpengaruh, hanya, untuk menunjukkan secara tepat bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut secara langsung relatif sulit (Eriyanto, 2001).

Senada dengan Eriyanto, dalam sebuah komunikasi personal dengan peneliti, berdasarkan pengalaman penelitiannya yang cukup lama mengenai teks media dan pengaruh pemilik media, Van Dijk (komunikasi personal, Januari 9, 2014) mengatakan "*True, media owners often do not interfere directly in news coverage, although there are many examples of such interference as is the case of Rupert Murdoch in his newspapers*"... "*In other words, the influence is indirect, via the knowledge of editors and reporters about the dominant ideologies of owners and chief editors*" (Memang benar, pemilik media seringkali tidak mencampuri secara langsung proses pembentukan konten berita, meskipun ada banyak contoh

keterlibatan mereka seperti contoh kasus keterlibatan Rupert Murdoch dalam kebijakan korannya...). Dengan kata lain, pemilik media memiliki pengaruh tidak langsung, melalui pemahaman redaktur dan reporter terhadap ideologi dominan yang dimiliki oleh pemilik media maupun pimpinan redaksi. Mengenai pengaruh pemilik media tersebut, Shoemaker dan Reese (1996) memiliki pendapat yang sama dengan Van Dijk. Menurut Shoemaker dan Reese (1996) perbedaan konstruksi konten berita, seperti halnya yang peneliti temukan pada Harian *SINDO*, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ideologi, organisasi media dan pemilik media.

Kembali menyinggung mengenai kajian korupsi menggunakan perspektif kritis, penulis menemukan beberapa penelitian terkait hal tersebut. Pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, Darmayanti dan Riyanto (2013) tentang wacana penggalangan dana (*saweran*) yang dilakukan oleh LSM untuk pembangunan gedung KPK di harian *Media Indonesia*. Ketiga peneliti tersebut menemukan bahwa DPR digambarkan secara negatif karena dinilai menolak usulan KPK untuk merenovasi gedung yang selama ini digunakan oleh KPK. Kedua, peneliti juga menemukan bahwa secara tidak langsung bahwa ideologi pemilik media yang menjadi ketua umum sebuah partai berpengaruh

terhadap konstruksi teks tentang *saweran* tersebut.

Selain studi tersebut, peneliti juga menemukan studi lain mengenai korupsi yang menggunakan metode studi wacana kritis, yakni studi yang dilakukan oleh Feraz dan Finan (2008). Mereka melakukan studi terhadap efek publikasi hasil audit calon legislatif incumbent yang tersangkut korupsi di media. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas calon-calon legislatif incumbent yang tersangkut korupsi menjadi menurun. Penelitian mengenai korupsi berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rocha, Brown, dan Cloke (2011). Ketiga peneliti tersebut mengkaji tentang penggunaan wacana-wacana tertentu oleh kelompok elit politik di Nikaragua agar negara mau menyediakan sumber dana bagi mereka. Penelitian tentang wacana korupsi yang dilakukan oleh ketiga akademisi tersebut dilakukan dengan menggabungkan perspektif Geografi kritis dan manajemen bisnis kritis.

METODE PENELITIAN

Peneliti mengadopsi model kognisi sosial Van Dijk untuk menggali dan menjelaskan secara kritis bagaimana harian *SINDO* mengatur strategi diskursus serta apa tujuan ideologis produsen teks dalam

mewacanakan skandal korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Data penelitian dikumpulkan dengan observasi teks, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Subyek penelitian adalah Harian *SINDO* yang terbit di Jakarta. Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berita tentang korupsi Anas Urbaningrum didalam harian *Seputar Indonesia* periode Februari 2013. Berita Harian *SINDO* yang dipilih untuk dianalisis sebanyak 10 buah. Informan penelitian antara lain pimpinan redaksi, wakil pimpinan redaksi, redaktur *desk* politik, wartawan politik yang bertugas melakukan peliputan tentang kasus hukum Anas Urbaningrum, Anas Urbaningrum, dan pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti.

Dalam menganalisis wacana mengenai korupsi Anas Urbaningrum, peneliti mengadopsi model kognisi sosial Teun Van Dijk. Di dalam model tersebut, wacana dianalisis kedalam tiga level yaitu level teks, kognisi sosial dan konteks sosial yang berkembang di seputar wacana korupsi Anas Urbaningrum. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai proses pengumpulan dan analisis data.

KORUPSI DAN ELIT POLITIK

(Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Korupsi Anas Urbaningrum di Harian *Seputar Indonesia* (SINDO))

Struktur	Metode
<p>Teks</p> <p>Menganalisis bagaimana strategi diskursif yang dipakai oleh wartawan <i>SINDO</i> untuk menggambarkan tentang isu korupsi Anas Urbaningrum.</p>	<p><i>Critical Linguistics</i>, yakni mengamati teks pada pada tiga struktur elemen linguistik pembentuknya.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada struktur makro, yang dianalisis adalah makna global dari rangkaian berita yang terkait dengan tema korupsi Anas Urbaningrum yang diangkat oleh Koran <i>SINDO</i>. b. Kemudian pada struktur superstruktur yang diamati adalah bagaimana strategi penulis teks berita dalam menyusun pola kerangka teks. Level ini menunjukkan strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan melalui penyusunan kerangka teks, yakni: pendahuluan, isi (latar tempat dan waktu, orientasi, komplikasi/konflik), dan kesimpulan (pemecahan masalah, evaluasi dan koda). c. Setelah itu, pada bagian mikro, yang dianalisis adalah makna lokal dari teks tentang korupsi Anas Urbaningrum, khususnya pada Februari 2013, yang dapat diamati dari pilihan kata (aspek stilistik), bentuk kalimat dan gaya bahasa (sintaksis), makna kata (semantik) misalnya pada judul maupun teras berita, metafora, serta gambar maupun grafis yang dipilih untuk melengkapi teks sehingga dapat memiliki kemampuan persuasi yang lebih besar kepada pembaca (aspek retorika). d. Aktor-aktor sosial yang disebutkan di dalam teks, misalnya Anas Urbaningrum, Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh-tokoh partai Demokrat lainnya, pakar hukum, pengamat politik maupun pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
<p>Kognisi Sosial</p> <p>Menganalisis bagaimana penulis memahami isu mengenai korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mengkonstruksi berita mengenai isu tersebut.</p>	<p>Wawancara mendalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan para wartawan, redaktur, maupun pimpinan media yang menjadi informan penelitian. Wawancara tersebut akan difokuskan pada proses pembuatan teks (berita tentang isu korupsi Anas termasuk pertimbangan apa yang dipakai ketika menyusun teks tersebut. Selain untuk mengetahui pertimbangan produksi berita, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana faktor internal (kebijakan media), eksternal, dan ideologi media berpengaruh terhadap kognisi produsen teks, dalam hal ini adalah jurnalis dan editor. b. Selain itu, wawancara kepada wartawan, redaktur maupun Pimred dilakukan untuk menggali informasi tentang latar belakang pendidikan, afiliasi politik baik

KORUPSI DAN ELIT POLITIK

(Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Korupsi Anas Urbaningrum di Harian *Seputar Indonesia* (SINDO))

<p>Kognisi Sosial</p> <p>Menganalisis bagaimana penulis memahami isu mengenai korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mengkonstruksi berita mengenai isu tersebut.</p>	<p>ketika masih menjadi mahasiswa maupun ketika sudah bekerja sebagai wartawan (apakah pernah bergabung dalam organisasi HMI), pengalaman liputan (<i>desk</i> politik maupun <i>desk</i> yang lain), durasi perkenalan dan interaksi dengan Anas Urbaningrum, bagaimana interaksi dengan Anas, serta bagaimana pemahaman informan tentang pribadi Anas Urbaningrum.</p> <p>c. Informasi-informasi diatas sangat berguna untuk mengetahui pertimbangan dalam pemilihan narasumber serta penajaman topik tertentu terkait dengan konstruksi berita korupsi Anas . Dengan mengetahui hal-hal tersebut peneliti dapat menemukan kekuatan dan tujuan ideologis dibalik produksi berita pada kasus Anas. Melalui wawancara mendalam, peneliti juga dapat mengetahui seberapa timpang pemberian akses secara khusus pada satu kelompok dibandingkan kelompok lain di Harian <i>SINDO</i>. Topik atau pola-pola kutipan dalam teks berita dapat menggambarkan akses sumber berita terhadap media.</p>
<p>Analisis Sosial</p> <p>Menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat seputar isu korupsi Anas maupun kondisi Partai Demokrat.</p>	<p>a. Studi Pustaka</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Peneliti mempelajari artikel-artikel yang beredar di media massa khususnya yang berkaitan dengan korupsi elit partai politik. (2) Mempelajari organisasi <i>SINDO</i> melalui pustaka yang tersedia pada <i>website</i> media yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh organisasi dalam produksi wacana berita mengenai Anas Urbaningrum, khususnya pada Bulan Februari 2013. (3) Artikel-artikel yang berisi opini masyarakat mengenai persoalan hukum mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. <p>b. Wawancara:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan pengamat politik yang memahami tentang wacana korupsi Anas Urbaningrum. (2) Dengan Anas Urbaningrum untuk mengetahui bagaimana hubungannya dengan media terutama yang berkaitan dengan wacana korupsi yang berkembang terhadapnya.

(Diolah dari Eriyanto, 2001: 275)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Wacana Korupsi Anas dalam Teks Berita SINDO

Pada bagian pertama, teks dianalisis secara linguistik kedalam tiga kategori. Analisis pada level teks ini berfungsi untuk menggambarkan adanya pergulatan diskursif pada pemberitaan mengenai skandal korupsi Anas Urbaningrum di Harian *SINDO*. Kategori pertama adalah makro teks. Pada kategori ini, peneliti mengkaji bagaimana harian *SINDO* menyajikan tema-tema berita yang berkaitan dengan kasus korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara global. Dari kelima berita yang dianalisis, peneliti menemukan pada level makro, harian *SINDO* menonjolkan tema bahwa isu korupsi yang dituduhkan pada Anas memiliki muatan politis, yakni untuk memaksa Anas turun dari jabatannya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Skema berita *SINDO* mengenai korupsi Anas Urbaningrum memiliki pola yang sangat konsisten, yakni bagian *summary* di pendahuluan berita merupakan simpulan mengenai adanya upaya untuk menjatuhkan Anas dari kursi kepemimpinannya. *SINDO* beberapa kali menulis kalimat-kalimat yang memiliki makna hiperbolis dan merupakan simpulan-simpulan penulis berita yang dibuat berdasarkan historis tentang awal perjalanan

karir politik Anas di Partai Demokrat. Salah satu contoh kalimat tersebut adalah “SBY Preteli Kekuasaan Anas” (Syarief, Ahmad & Sahid, 2013). Tujuan dari simpulan tersebut adalah untuk membangun pemahaman pembaca mengenai adanya skenario politik dibalik kasus korupsi Anas,

Kemudian pada bagian *main story* (tubuh berita) berisi latar belakang informasi yang tujuannya adalah agar nilai berita yang disajikan menjadi lebih *reliable*. Untuk mencapai tujuannya tersebut, pada tubuh berita *SINDO* banyak menyajikan komentar pengamat politik mengenai rangkaian peristiwa politik yang terjadi sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain itu, *SINDO* juga beberapa kali mengutip pendapat pengamat politik yang menyatakan bahwa upaya SBY ketika meminta KPK segera memperjelas status Anas merupakan sebuah intervensi politik yang dapat meneguhkan klaim *SINDO* bahwa isu korupsi Anas lebih bermuatan politis ketimbang hukumnya.

Pada kategori mikro, terutama dari analisis pada aspek semantik, peneliti menemukan adanya koherensi antar kalimat. Koherensi yang dimaksud yakni masing-masing kalimat ditulis untuk menjelaskan secara detil serta mendukung kalimat-kalimat yang ditulis sebelumnya. Hal ini dapat dilihat antara lain dari penulisan latar belakang

peristiwa politik baik ketika Anas dibebastugaskan dari jabatannya sebagai ketua umum partai oleh SBY sebagai ketua dewan pertimbangan partai, maupun ketika Anas ditetapkan sebagai tersangka korupsi Hambalang oleh KPK.

Dari aspek bentuk kalimatpun (sintaksis) peneliti menemukan bahwa pada judul, Anas selalu ditempatkan pada posisi obyek yang dipersepsikan positif. Sedangkan pihak yang digambarkan sebagai subyek adalah sebuah kekuatan besar yang direpresentasikan sebagai sosok negatif. Selain itu, dari pilihan kata untuk merepresentasikan aktor sosial di dalam teks, dapat diketahui bahwa *SINDO* dalam beberapa teks menunjukkan bahwa pihak yang besebrangan dan ingin Anas mundur dari kepemimpinannya di PD adalah sekelompok orang. Salah satu contohnya adalah pada judul berita “Senior Demokrat Goyang Anas” (Sahid, 2013). Pada kalimat tersebut, subyek tidak disebutkan secara spesifik siapa orang dan berapa jumlahnya, *SINDO* hanya menyebutkan pihak yang ingin Anas mundur dari jabatannya adalah pimpinan di Demokrat yang telah senior.

Kemudian dari aspek stilistik, peneliti menemukan beberapa pilihan kata yang menunjukkan adanya dugaan tentang rekayasa politik dibalik status hukum Anas

Urbaningrum. Pilihan kata tersebut, misalnya dapat ditemukan pada judul berita *SINDO* tanggal 6 Februari 2013, yakni “Desakan Anas Mundur Sistematis”. Kata sistematis disini mengandung makna terencana, atau tersusun rapi. Untuk membangun pemahaman pembaca mengenai adanya skenario politik dibalik kasus korupsi Anas, *SINDO* beberapa kali menulis kalimat-kalimat yang memiliki makna hiperbolis dan merupakan simpulan-simpulan penulis berita yang dibuat berdasarkan historis tentang awal perjalanan karir politik Anas di Partai Demokrat. Salah satu contoh kalimat tersebut adalah “SBY Preteli Kekuasaan Anas” (Syarief, Ahmad & Sahid, 2013).

2. Struktur Kognisi Sosial Wartawan *SINDO*

Dalam memahami sebuah teks, diperlukan pemahaman mengenai kognisi produsen teks. Menurut Van Dijk (1988: 14) analisis terhadap kognisi produsen teks berfungsi “*They explain how newsmakers continuously and routinely summarize the myriad of source texts (other media messages, wires, interviews, reports, or press conferences) that are used in the production of a specific news report* (Analisis pada level kognisi dapat menjelaskan bagaimana para pembuat berita secara rutin dan kontinyu menyimpulkan dari beragam teks sumber

(pesan-pesan media yang lain, artikel internet, wawancara, laporan maupun konferensi pers) yang kemudian digunakan untuk menulis berita tertentu. Pada tahap ini, peneliti menemukan beberapa hal terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi wartawan dalam menulis berita tentang korupsi Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dari wawancara mendalam, Pimred *SINDO*, yakni S, yang menjadi informan peneliti mengakui bahwa untuk memilih *angle* mengenai kasus Anas, dilakukan melalui mekanisme rapat redaksi. Poin-poin yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sudut pandang dalam kasus Anas antara lain pesatnya karir politik Anas di PD yang ditandai dengan terpilihnya Anas sebagai ketua umum PD sehingga potensial menimbulkan ketidaksukaan dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu menjagokan Andi Mallarangeng sebagai ketua umum. Kedua, menurut informan S, Anas merupakan sosok *leader* yang memiliki basis pendukung yang kuat di PD sehingga hal tersebut menumbuhkan kekhawatiran pihak-pihak yang besebrangan dengannya di internal partai. Ketiga, publikasi besar-besaran yang mengkaitkan isu skandal korupsi Anas sebelum ada keputusan hukum yang *inkracht* dengan kemerosotan tingkat elektabilitas

partai. Keempat, meskipun kasus Anas telah muncul sejak awal tahun 2012, hingga awal tahun 2013 Anas belum juga ditahan oleh KPK.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan pengalaman interaksinya yang intensif dengan Anas sejak sebelum menjadi Pimred di *SINDO*, informan S, mengatakan bahwa akhirnya *SINDO* memutuskan untuk mengambil *angle* membela Anas. Mengenai kebijakan tersebut, S mengatakan bahwa *trial by the press* dalam pemberitaan mengenai persoalan hukum Anas oleh mayoritas media di Indonesia merupakan kelemahan koran di Indonesia. Menurutnya, media tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memandang sebuah kasus dari berbagai aspek.

Sosok Anas yang santun, cerdas dalam berkomunikasi juga diakui oleh informan-informan peneliti di Harian *SINDO* lainnya. Salah satu asisten redaktur, H, bahkan mengatakan Anas sering mengajak berkomunikasi secara terbatas para wartawan politik bahkan pimpinan media diluar pekerjaan mereka. Dalam kesempatan tersebut, tambah informan H, Anas sering memberikan informasi *background* mengenai sebuah permasalahan terutama di Partai Demokrat. Lebih jauh, menurut H, meskipun nama Anas telah sering disebut-sebut terlibat dalam kasus

korupsi Hambalang, namun Anas masih bersifat terbuka terhadap wartawan yang ingin menanyainya terkait tuduhan tersebut.

3. Konteks Sosial Seputar Wacana Korupsi Anas Urbaningrum

Pemberitaan mengenai penahanan politisi karena terjerat kasus korupsi oleh KPK hampir setiap hari dijumpai di media terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014. Banyaknya elit parpol yang terlibat korupsi, dinilai salah satunya disebabkan oleh mahalnnya biaya politik di Indonesia. Politisi harus mengeluarkan sejumlah besar uang ketika mencalonkan diri baik di level internal organisasi maupun legislatif, minimal untuk memberikan biaya transportasi demi menggalang pendukung. Biaya tersebut masih ditambah dengan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk membeli atribut kampanye atau mendapat rekomendasi dari pimpinan pusat partai.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (2013) para calon anggota legislatif atau para calon kepala daerah sampai calon presiden, harus menyiapkan dana yang sangat besar untuk mengikuti proses politik sampai akhirnya terpilih. Biaya sudah harus dikeluarkan dalam bentuk “mahar politik” pada partai yang akan mencalonkannya. Masih menurut Mahfud, selain mahar, politisi masih diharuskan

mengeluarkan biaya untuk kampanye, membuat spanduk dan baliho, iklan di televisi, mendatangi konstituen, menyiapkan serangan fajar (money politics), upah untuk konsultan politik dan biaya survey sampai honor untuk para saksi di TPS. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, seorang politisi harus mengerahkan semua aset yang dimilikinya. Oleh karena itu ketika terpilih, yang kemudian difikirkan oleh politisi tersebut adalah bagaimana mencari dana untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan untuk mencalonkan diri.

Lebih jauh, salah satu bukti empiris yang juga menunjukkan tingginya perputaran uang dalam politik adalah tingginya belanja iklan parpol terutama menjelang Pemilu tahun 2014. Managing Director Nielsen Indonesia, Irawati Pratignyo, mengatakan nilai belanja iklan partai politik dan pemerintah daerah selama semester pertama 2013 naik 56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja iklan yang dihabiskan oleh partai politik dan pemerintah daerah pada semester pertama tahun lalu mencapai Rp 2,72 triliun (dikutip dalam Prworld, 2013). Iklan-iklan tersebut berfungsi untuk melakukan kampanye mengenai sosok calon legislatif, calon presiden maupun profil partai.

Kembali pada persoalan hukum Anas, mantan ketua umum Partai Demokrat tersebut

mengaku kepada peneliti bahwa dirinya sedang menjadi korban dari sebuah rekayasa. Anas mengatakan, “Setelah ditetapkan tersangka, baru dicari-cari. Apa saja dicari-cari. Banyak banget orang dipanggil menjadi saksi. Kalau mayat bisa dipanggil mungkin akan dijadikan saksi juga” (Urbaningrum, komunikasi personal, Desember 12, 2013). Lebih detil, dia menjelaskan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar oleh KPK untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka Hambalang berubah-ubah. Hingga dijadikan tersangka seperti saat ini, menurut Anas, KPK masih terus menerus mencari-cari bukti-bukti yang bisa memenjarakan dirinya. Namun demikian, opini yang dikembangkan di masyarakat mengesankan bahwa Anas memang benar-benar menikmati hasil korupsi proyek Hambalang. Mengenai hal ini, Anas berpendapat, “Opini yang bertubi-tubi adalah prakondisi kriminalisasi” (Urbaningrum, Desember 12, 2013).

KESIMPULAN

Dari rangkaian berita yang diteliti mulai dari tanggal 4 Februari hingga 23 Februari 2013, peneliti menyimpulkan bahwa posisi *SINDO* adalah membela Anas. Hal ini dapat dilihat dari struktur teks dan strategi diskursus yang memperlihatkan argumentasi yang cenderung membela Anas Urbaningrum. Hal lain yang mendukung simpulan ini adalah

adanya penonjolan aspek politik disetiap wacana yang berhubungan dengan persoalan hukum Anas pada judul dan *lead* pada teks berita. Sosok Anas direpresentasikan sebagai sosok yang lemah dan SBY maupun beberapa senior Demokrat yang besebrangan dengan Anas digambarkan sebagai sosok kuat, arogan dan memiliki niat buruk untuk menjegal karir politik Anas di Partai Demokrat. Konfirmasi dari pihak-pihak yang dikatakan berusaha untuk mendesak Anas mundur dari jabatannya, sengaja dikaburkan. Selain itu, pendapat-pendapat pakar hukum maupun pakar politik yang relatif netral diletakkan di akhir teks berita atau tidak ditonjolkan.

Semua wartawan, redaktur dan pimpinan koran *SINDO* yang menjadi informan penelitian ini sepakat bahwa tugas mereka sebagai jurnalis adalah memberikan informasi seakurat mungkin untuk mengedukasi masyarakat. Merekapun sepakat bahwa untuk kasus-kasus korupsi terutama yang melibatkan politisi dibutuhkan kontrol sosial agar penegakan hukumnya berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi keyakinan ini realisasinya berbeda ketika mereka memproduksi berita mengenai korupsi Anas. Informan di Harian *SINDO* menegaskan bahwa mereka lebih berfokus pada wacana politiknya karena yakin bahwa Anas tidak bersalah dan dia hanyalah korban politik dari

kubu pendukung SBY sehingga perlu dibela. Keyakinan tersebut didapat dari pengalaman interaksi dengan Anas yang intens dan berlangsung lama sejak sebelum kasus tersebut merebak.

Pada elemen konteks sosial, nampak bahwa media massa menjadi arena pertarungan ideologi. Masing-masing pihak yang terkait atau memiliki perhatian terhadap kasus korupsi Anas Urbaningrum sama-sama ingin mengukuhkan hegemoninya atas kasus tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya wacana mengenai skenario politik yang dilatar-belakangi oleh rivalitas politik antara Anas dengan SBY yang merupakan patron Partai Demokrat dibalik penetapan status tersangka mantan ketua umum PD tersebut.

SARAN-SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yakni:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pendekatan yang lebih intensif sebelum melakukan penelitian kepada pemilik media agar peneliti dapat memetakan ideologi yang dimiliki oleh pemilik media.
2. Agar lebih mampu menyelami tentang kognisi sosial wartawan atau produsen berita, sebaiknya peneliti berikutnya

melakukan observasi partisipan supaya dapat mengetahui sejauh mana kedekatan antara wartawan dengan sumber berita serta bagaimana cara wartawan menggali berita.

3. Wawancara mendalam kepada produsen teks yang berkaitan langsung dengan produksi wacana sangat dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai produksi sebuah teks wacana.
4. Peneliti memandang perlunya dilakukan analisis terhadap konteks sosial yang lebih luas, tidak hanya lewat penelusuran pustaka, wawancara dengan ahli ataupun pengamat yang menguasai isu tertentu, melainkan juga melalui jejaring media sosial. Penggunaan media sosial sebagai ajang untuk beropini maupun memberikan informasi di Indonesia makin hari makin meningkat intensitasnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Auliani, P. (Desember 10, 2013). Anas dan Akil, Fenomena Berita Korupsi 2013. *Kompas*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/10/1151230/>
- Dharmasaputra, K. 2009. Media dan Foklor Korupsi. Dalam Wijayanto & R. Zachrie (Ed.), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan* (hal. 693-730). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dijk, A. T. (1988b). *News as Discourse*. Diakses pada 15 Maret, 2013, dari <http://www.discourses.org/download/articles/>.
- Dijk, V., T. 2013. *Discourse-Cognition-Society: Current State and Prospects of the Socio-Cognitive Approach to Discourse*. Dalam C. Hart & P. Cap (Ed). *Contemporary Studies in Critical Discourse Analysis*. Diakses dari <http://www.discourses.org>.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS
- Feraz, C., & Finan, F. 2008. Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil's Publicly Released Audits on Electoral outcomes. *The Quarterly Journal of Economics*, h. 703-746.
- Kriyantono, R. 2012. *Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Laluhulu, S. (Maret 7, 2013). *KPK Incar LHI jadi Tersangka TPPU*. Diakses dari www.nasional.sindonews.com.
- Machin, D., & Mayr, A. 2012. *How to Do Critical Discourse Analysis*. London: Sage Publication Ltd.
- Mahfud, M., D. (Oktober 23, 2013). *Korupsi dan Biaya Politik Tinggi* [web log post]. Diakses dari <http://www.mahfudmd.info>.
- Mayasari, Darmayanti, N., & Riyanto, S. 2013. *Critical Discourse Analysis of Reporting on Saweran for KPK Building in Media Indonesia Daily Newspaper*, 5(4). doi:10.5296/ijl.v5i4.4198
- Riadi, S. (Oktober 17, 2013). *Kasus Hambalang, KPK Tahan Andi Mallarangeng*. Diakses dari www.nasional.sindonews.com.
- Sahid, R., Syarief. (2013, Februari 4). Senior Demokrat Goyang Anas. *Seputar Indonesia*, h.1.
- Sahid, R. (2013, Februari 9). SBY Preteli Kekuasaan Anas . *Seputar Indonesia*, h.1.
- Shoemaker, P., & Reese. S. 1996. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. New York: Longman.
- Syamsudin, Haris. (Juni 15, 2012). *Perseteruan SBY dan Anas*. [web log post]. Diakses dari www.syamsudinharis.wordpress.com.